

DAMPAK PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP PERUBAHAN BUDAYA BIROKRASI UNTUK MENCAPAI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN

Sharfina Fildzah Amalia¹, Muhammad Khoirul Anwar²

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail: sharfinaamalia3@gmail.com¹, m.khoirulanwar@umj.ac.id²

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang besar antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat diatasi dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital yang disebut e-government atau lebih dikenal dengan e-government. E-government tidak hanya sebuah situs web di Internet, tetapi juga mencakup berbagai fungsi yang sangat luas, termasuk proses dan struktur mempromosikan berbagai bentuk interaksi elektronik antara pemerintah dan masyarakat. Interaksi ini bertujuan untuk mendorong dan mendorong terwujudnya demokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat juga dikatakan bahwa e-government sejalan dengan karakteristik pengelolaan pemerintahan yang transparan dan efisien Dalam hal manajemen pemerintahan. Solusi yang diberikan oleh e-government tidak hanya membutuhkan terminologi teknis sistem informasi dan teknologi komunikasi, tetapi juga reorientasi birokrasi secara menyeluruh, terutama kesadaran menjalankan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam e-government. Di satu sisi, perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus dimulai dengan komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi secara profesional. Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah masyarakat, pihak swasta dan pemerintah membutuhkan interaksi dan sinergi yang baik untuk mencapai implementasi e-government yang terbaik.

Kata kunci: e-government, budaya, birokrasi

THE IMPACT OF IMPLEMENTING E-GOVERNMENT ON CHANGING BUREAUCRATIC CULTURE TO ACHIEVE TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN THE MODERN GOVERNMENT SYSTEM

Abstract

Advances in information technology have opened up great opportunities between politics, bureaucracy and society. The public can participate directly in the process of planning, implementing and monitoring public policies. This can be addressed by a digital technology-based government system called e-government or better known as e-government. E-government is not only a website on the Internet, but also covers a very wide range of functions, including the process and structure of promoting various forms of electronic interaction between the government and society. These interactions aim to encourage and promote democracy and more transparent and accountable government management. It can also be said that e-government is in line with the characteristics of transparent and efficient government management in terms of government management. The solutions provided by e-government require not only the technical terminology of information system and communication technology, but also a thorough reorientation of the bureaucracy, especially the awareness of carrying out tasks and functions neutrally and purely in the e-government. On the one hand, technological changes will bring changes, both

administrative changes and cultural changes. Realizing how difficult it is to make changes, it must start with the technology professionally. One more thing that should not be forgotten is that the community, the private sector and the government need good interaction and synergy to archive the best e-government implementation.

Keywords: *e-government, culture, bureaucracy*

PENDAHULUAN

E-government didefinisikan sebagai kumpulan konseptual dari semua tindakan sektor publik (di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah), yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Istilah e-government mengacu pada kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan bisnis, dan antara satu lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi tersebut antara lain e-mail, WAN (Wide Area Network), Internet, perangkat komputasi bergerak (laptop, ponsel pintar, PDA), dan berbagai teknologi lainnya yang menyebarkan informasi dan menyediakan layanan elektronik dalam berbagai bentuk. Secara umum, konsep e-government adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Dengan menggunakan internet, dari pemerintah hingga masyarakat akan banyak dikembangkan model pelayanan yang memungkinkan masyarakat berperan aktif, diharapkan masyarakat dapat mendaftar pelayanan secara mandiri, memantau proses penyelesaiannya, dan langsung melayani masyarakat. Setiap pelayanan publik. Semua hal tersebut dapat dilakukan dengan bantuan teknologi internet, dan dapat dilakukan kapan saja, dimana saja. E-government adalah digitalisasi pemberian layanan pemerintah kepada masyarakat atau warga negara. Selain itu, e-government juga merupakan proses demokratisasi, dan keberadaan e-government juga berarti memecah jalur birokrasi yang ada. Tujuan dari e-government adalah untuk meningkatkan akses warga negara terhadap layanan publik atau pemerintah dan meningkatkan akses publik terhadap semua sumber informasi pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang diharapkan oleh seluruh warga negara. Dengan adanya E-Government, berarti harus ada standarisasi kualitas layanan yang bisa dinikmati masyarakat.

Dalam gagasan e-government, individu dapat berbicara dengan pos administrasi, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan organisasi yang didukung pembayar pajak, atau mengirim surat. Sejalan dengan itu, sesuai kapasitasnya, e-gov merupakan pemanfaatan inovasi data yang dapat lebih mengembangkan hubungan antara otoritas publik dan berbagai perkumpulan. Secara keseluruhan, e-gov adalah pekerjaan untuk menciptakan organisasi pemerintah berbasis elektronik (memanfaatkan) untuk bekerja pada sifat administrasi publik dengan sukses dan produktif. Untuk alasan apa e-gov menjadi vital dan esensial untuk dijalankan? Penjelasaannya adalah: secara umum, komunikasi antara penduduk atau organisasi sosial dan kantor administrasi secara konsisten terjadi di tempat kerja pemerintah. Namun, seiring dengan munculnya inovasi data dan korespondensi (TIK) semakin dimungkinkan untuk membawa tempat organisasi yang didukung pembayar pajak lebih dekat ke setiap pelanggan. Contohnya ; Misalkan ada pusat administrasi yang tidak dilayani oleh instansi pemerintah, ada stand yang dekat dengan pelanggan atau dengan penggunaan PC di rumah atau di tempat kerja. E-gov memberikan kebebasan baru untuk bekerja pada sifat pemerintahan, dengan memperluas produktivitas, administrasi baru, memperluas dukungan penduduk dan peningkatan dalam kerangka data di seluruh dunia. Dengan demikian e-gov akan bekerja pada sifat administrasi data publik sebagai metode untuk mengakui pemerintahan yang hebat. Melalui e-Government, organisasi yang digerakkan oleh pembayar pajak akan terjadi secara lugas, siklus dapat diikuti, dengan tujuan cenderung dianggap bertanggung jawab. Komponen penyimpangan dapat

dihindarkan dan administrasi dapat diberikan secara memadai dan tepat. Ada sekitar tiga faktor yang menyebabkan pentingnya e-government dalam kemajuan daerah, khususnya:

1. Komunikasi antara area publik dan masyarakat menawarkan jenis dukungan dan komunikasi antara keduanya. Waktu yang dibutuhkan lebih terbatas, meskipun tingkat kenyamanan administrasi lebih signifikan. Juga, jenis pertukaran baru akan mendorong perluasan pengaturan publik dan pengakuan atas kegiatan yang diambil oleh otoritas publik.
2. Teknologi Informasi di administrasi terbuka memungkinkan penghapusan konstruksi peraturan dan siklus kusut. Tujuan yang wajar untuk dicapai melalui internet adalah produktivitas administrasi dan dana investasi moneter. Data online di administrasi siang bolong dapat membangun tingkat informasi publik tentang interaksi dan kebutuhan bantuan publik.
3. E-government juga memberikan data lingkungan terdekat. Penggunaan internet di area publik akan memungkinkan jaringan lokal untuk bersaing dengan pergantian acara di seluruh dunia.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian studi perpustakaan (library research). Penelitian ini berupa mengetahui dampak penerapan e-government terhadap perubahan budaya birokrasi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam sistem Pemerintahan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan E-Government di Indonesia dan Contoh Perubahan Budaya Administrasi

Electronic Government atau e-government merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pemanfaatan inovasi data untuk organisasi yang didukung wajib pajak kepada masyarakat pada umumnya. Pemajuan e-government merupakan upaya untuk membina organisasi pemerintahan berbasis elektronik untuk bekerja pada sifat administrasi publik dengan sukses dan efektif. Pandangan dunia organisasi yang didukung pembayar pajak yang digambarkan oleh administrasi melalui organisasi yang lamban, sistem yang kusut dan tidak adanya jaminan berusaha dikalahkan melalui pelaksanaan e-government.

Penyampaian administrasi kepada masyarakat luas dalam pandangan dunia e-government umumnya belum dilakukan melalui laporan dan kerjasama individu belum dilakukan secara elektronik sehingga tidak ada lagi komunikasi yang dekat dengan rumah dalam penyampaian bantuan. Arah produktivitas biaya penciptaan dalam pengangkutan bantuan telah bergerak ke arah yang menggarisbawahi kemampuan beradaptasi, manajemen dan pemenuhan klien. Di Indonesia, dorongan menuju electronic government telah dimunculkan mulai sekitar tahun 2001 melalui Instruksi Resmi Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telematik, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa otoritas administrasi harus memanfaatkan inovasi telematika untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mempercepat popularitas berbasis siklus. Penerbitan Pedoman Resmi No. 3 Tahun 2003 tentang Pendekatan dan Metodologi Publik Penyempurnaan e-government merupakan kemajuan sejati bagi Badan Publik Indonesia untuk menggunakan inovasi data dan korespondensi dalam proses otoritas publik dan menjadikan budaya Indonesia berbasis data. Teknik prinsip yang diambil oleh otoritas publik adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kerangka kerja bantuan yang solid dan percaya diri yang wajar dengan wilayah lokal yang lebih luas;
2. Penataan kerangka administrasi dan siklus kerja pemerintah pusat dan legislatif lingkungan secara komprehensif;
3. Pemanfaatan inovasi data yang ideal;

4. Memperluas kerjasama dunia usaha dan kemajuan industri komunikasi penyiaran dan inovasi data;
5. Pemajuan SDM di pemerintahan dan peningkatan e-edukasi daerah;
6. Eksekusi kemajuan yang disengaja melalui tahapan yang wajar dan terukur.

Kebijakan e-government dalam kerangka pemerintahan Indonesia sangat berkaitan dengan periode Perubahan Administratif yang saat ini sedang disesuaikan oleh otoritas Publik karena dipandang memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Dukungan yang lebih baik dari daerah setempat. Data dapat diberikan 24 jam, 7 hari setiap minggu, tanpa percaya bahwa tempat kerja akan terbuka. Data dapat dilihat dari tempat kerja, rumah tanpa harus benar-benar pergi ke kantor otoritas publik.
2. Hubungan yang dikembangkan lebih lanjut antara otoritas publik, pengelola uang, dan populasi secara keseluruhan. Dengan penerimaan, diyakini hubungan antara pertemuan yang berbeda akan lebih baik. Transparansi ini membunuh keraguan dan kebencian bersama dari semua pertemuan.
3. Penguatan wilayah lokal melalui data yang diperoleh secara efektif. Dengan data yang memadai, individu dapat mengetahui bagaimana menyelesaikan keputusan mereka. Misalnya, informasi tentang sekolah; jumlah kelas; batas siswa, nilai kelulusan, dll.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih produktif. Misalnya, koordinasi pemerintah harus dimungkinkan melalui email dan bahkan konferensi video.

Implementasi E-Government Dalam Transparansi Keterusterangan Dan Tanggung Jawab Dalam Kerangka Pemerintah.

Penduduk Indonesia sangat mengharapkan pemerintahan yang lugas, terbuka, solid dan definitif. Pelaksanaan e-government yang baik harus dilakukan untuk fokus pada tujuan terhormat bekerja pada administrasi terbuka. Masa perkembangan dari cara lama ke masa yang lebih maju membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari perencanaan, pemberian jabatan dan kerangka kerja, SDM, kemudian, pada saat itulah masyarakat umum untuk memahami e-government bertekad untuk memperoleh kantor administrasi dari otoritas publik.

Tahap-tahap ini harus dilakukan dalam memahami kebebasan penduduk dalam memperoleh izin masuk ke administrasi pada titik apa pun yang diperlukan.

Menurut , (Nugroho, 2007) tahapan kemajuan pelaksanaan e-government di Indonesia terbagi menjadi empat:

1. Web Presence, yang memunculkan situs-situs terdekat di web. Pada tahap ini, data fundamental yang dibutuhkan oleh daerah ditampilkan di situs otoritas publik.
2. Koneksi, khususnya web lokal yang menyediakan kantor komunikasi antara daerah dengan Pemerintah Provinsi. Pada tahap ini data yang ditampilkan lebih berfluktuasi, misalnya download office dan email korespondensi di situs otoritas publik.
3. Pertukaran, yang selain memiliki kantor komunikasi, juga dilengkapi dengan kantor tukar bantuan publik dari otoritas publik.
4. Perubahan, untuk lebih spesifik untuk situasi ini, organisasi yang digerakkan oleh pembayar pajak diperluas secara terpadu.

Dalam Instruksi Resmi (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pendekatan dan Metodologi Publik untuk Kemajuan e-government, ditegaskan bahwa pelaksanaan e-government di setiap yayasan pemerintahan menyinggung tahapan-tahapan perbaikan e-government secara luas. , dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap organisasi administrasi yang meliputi:

1. Kebutuhan administrasi elektronik untuk diberikan;
2. Keadaan kerangka data yang diklaim;
3. Latihan administrasi negara saat ini;
4. Keadaan rencana keuangan dan HR yang diklaim.

Rentang waktu pelaksanaan e-government di setiap organisasi administrasi berubah

sesuai dengan kondisi yang ada, namun tetap berada dalam sistem rencana pelaksanaan e-government publik. Tahapan dalam melaksanakan e-government di setiap organisasi administrasi berikut:

1. Tingkat Perencanaan, meliputi: a. Produksi situs pemerintah di setiap pendirian; B. Pembinaan dan penyiapan SDM menuju pelaksanaan e-government; C. Penataan kantor gratis antara lain sebagai Tempat Umum Serba Guna (PKS), Web pelambatan dan stand booth, dan lain-lain; D. Sosialisasi keberadaan penatausahaan data elektronik, baik untuk kepentingan publik maupun penggunaan internal; e. Kemajuan inspirasi inisiatif (e-authority) dan perhatian terhadap pentingnya manfaat e-government (pembangunan kesadaran); F. Kesiapan pedoman pendukung.
2. Tingkat Pengembangan, meliputi: a. Membuat situs data bantuan publik yang intuitif, antara lain dengan menambahkan kantor web crawler, kantor Tanya Jawab dan lain-lain b. Membangun bergabung dengan tujuan data institusional lainnya (hyperlink).
3. Tingkat Kombinasi, antara lain: a. Penataan kantor penukaran elektronik antara lain dengan menambah struktur kantor akomodasi, kantor angsuran dan lain-lain; b. Penyatuan pemanfaatan kegunaan dan informasi dengan organisasi yang berbeda (interoperabilitas).
4. Tingkat penggunaan, antara lain: a. Membuat aplikasi berbeda untuk administrasi G2G (Government to Government), G2B (Government to Business) dan G2C (Government to Local area) yang tergabung; b. Kemajuan proses organisasi yang didukung oleh wajib pajak elektronik yang menarik dan mahir; c. Peningkatan menuju kualitas bantuan terbaik (best practice). Salah satu langkah awal besar yang harus diambil oleh otoritas publik di suatu negara adalah mencoba mengukur sejauh mana ketersediaan otoritas publik di negara tersebut dalam menjalankan gagasan e-government. KPMG, sebuah perusahaan konseling utama di planet ini, mempresentasikan strategi yang dikenal sebagai "pemeriksaan batas e-Government" atau sering disebut sebagai "pemeriksaan kapasitas e-government". Ada 6 (enam) perspektif yang harus direnungkan oleh pendekatan untuk memutuskan status otoritas publik untuk menghadapi pemanfaatan ide dan standar e-government.

Bagian-bagian dari e-System Hal utama yang harus dipusatkan pertama adalah pada level esensial, di mana kita mencoba untuk mendobrak sejauh mana otoritas publik tidak bercanda tentang pemahaman, kebutuhan, dan gagasan yang benar dan jelas tentang e-pemerintah yang perlu dijalankan.

Ada 4 (empat) sub-sudut yang harus diperiksa mengenai hal ini, yang masing-masing adalah sebagai berikut: a. E-Vision diidentikkan dengan apakah otoritas publik dan mitranya memiliki visi dan misi yang masuk akal sehubungan dengan keyakinan untuk merencanakan, mengarah, dan mendorong e-government di kemudian hari, yang jelas telah bercampur, dirasakan, dan dijunjung oleh semua tingkatan. dari administrasi. di pemerintahan; b. Governance diidentikkan dengan adanya yayasan-yayasan yang dijunjung oleh seluruh organisasi penyelenggara pemerintahan untuk berjalan sebagai pelopor, fasilitator, dan fasilitator dari semua usaha yang terkait dengan pencapaian visi dan misi e-government yang telah dicanangkan; c. Teknik, Rencana, dan Pendekatan mengidentifikasi dengan kemajuan pengaturan siklus, sistem, dan pengaturan untuk peningkatan e-government yang sesuai dengan dan penting untuk metodologi kemajuan publik (negara) secara keseluruhan; dan d. Aset Tanggung jawab mengidentifikasi dengan kebenaran porsi aset penting suatu negara (seperti SDM, sumber daya, keuangan, dan sebagainya) dalam proyek e-government.

Bagian Desain Sudut pandang kedua yang juga harus dipertimbangkan adalah terkait dengan rekayasa kerangka kerja dan inovasi data yang saat ini dimiliki oleh pemerintah pusat. Pada dasarnya ada 6 (enam) sub-sudut pandang yang harus dipikirkan secara matang, yang masing-masing adalah: a. Plan of action mengidentifikasi sejauh mana otoritas publik telah

berlaku dalam merencanakan seluruh proses pendampingan (proses bisnis) dalam administrasi yang akan diubah menjadi e-government; b. Keamanan diidentifikasi dengan pelaksanaan kerangka keamanan e-government untuk membangun kepercayaan publik dan individu lain yang diinvestasikan, bahwa pertukaran elektronik dengan otoritas publik dipastikan informasi dan keamanan pertukaran (dapat diandalkan); c. Informasi mengidentifikasi dengan telah merencanakan semua kebutuhan informasi dan koneksi mereka (model informasi) yang harus diawasi dalam e-government, terutama bagaimana informasi mentah diperoleh, diatur, disimpan, sampai, dan diedarkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya untuk penanganan tambahan. ke dalam data. juga, informasi d. Aplikasi khawatir tentang karakterisasi dan pelaksanaan aplikasi dan pemrograman yang berbeda dalam setiap drive e-government, terutama yang diidentifikasi dengan masalah menggabungkan berbagai aplikasi ke dalam kerangka aplikasi yang mencakup semua atau lengkap; e. Inovasi diidentifikasi dengan jaminan rincian standar untuk penggunaan (peralatan) sehingga tidak ada hambatan dalam menggabungkan kerangka data secara keseluruhan, serta mempertimbangkan variabel seperti biaya, peluang, aksesibilitas, pola, dan lain-lain; dan f. Organisasi diidentifikasi dengan prinsip-prinsip korespondensi data yang tidak terlalu kaku melalui kerangka organisasi yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan.

Bagian dari Bahaya dan Program Para eksekutif Sudut berikut yang harus dipertimbangkan diidentifikasi dengan administrasi proyek e-government dan bahaya yang tampak selama waktu yang dihabiskan untuk membuat dan melaksanakannya. Ada 4 (empat) sub-sudut signifikan yang harus dipikirkan, yang masing-masing adalah:

1. Bahaya Para eksekutif mengidentifikasi sejauh mana otoritas publik memiliki komponen untuk mengenali, mensurvei, menghitung, dan menyaring berbagai bahaya yang disajikan oleh pelaksanaan proyek e-government, baik skala penuh maupun miniatur.
2. Portofolio Dewan khawatir tentang keterbatasan spesialis publik untuk menangani berbagai proyek e-Government (portofolio), terutama sejauh menyusun, memeriksa dan mensurvei setiap upaya saat ini dan pengaruhnya terhadap keseluruhan program e-government yang sedang berjalan. disampaikan;
3. Manajemen Tugas mengidentifikasi dengan adanya proyek e-government standar komponen dewan, sesuai standar yang diketahui melakukan standar eksekutif (misalnya bergantung pada Badan Pengetahuan Manajemen Proyek);
4. Transformasi Bisnis diidentifikasi dengan kapasitas untuk mengendalikan perubahan alam karena perubahan dari metodologi utama pemerintah untuk menangani pelaksanaan e-government berbasis.

Bagian dari Kemampuan Organisasi Perspektif ini secara tegas diidentifikasi dengan kapasitas pertemuan internal dalam kerangka otoritas publik untuk menyesuaikan diri dengan ide otoritatif baru yang disajikan oleh e-government. Pada umumnya ada 3 (tiga) sub-sudut yang diidentifikasi dengan ini, masing-masing adalah sebagai berikut: a. Kompetensi e-government mengidentifikasi dengan adanya sistem di dalam otoritas publik untuk mengkarakterisasi, mendaftarkan, membuat, dan menahan SDM yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang diharapkan untuk melaksanakan e-government secara ideal; b. Alat dan Teknik e-government diidentifikasi dengan kepemilikan otoritas publik atas strategi dan filosofi (dan dinas terkait) sebagai metode untuk mendukung dalam menyusun, merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai kerangka kerja e-government yang dijalankan; dan c. Pembelajaran Hirarki diidentifikasi dengan kapasitas otoritas publik untuk membuat dan menyebarkan informasi yang dimilikinya melalui penanganan informasi dan data setiap hari kepada pihak-pihak di dalamnya yang membutuhkannya.

Bagian dari Rantai Nilai Signifikan Para eksekutif Sudut pandang ini mengidentifikasi dengan kapasitas otoritas publik untuk menangani perkembangan siklus atau latihan untuk

membuat item atau administrasi dalam kerangka e-government. Tidak kurang dari 3 (tiga) hal yang harus dikonsentrasikan secara khusus, yaitu: a. *Accomplice Connections* diidentifikasi dengan bantuan untuk berbagai upaya pemerintah dan staf mereka untuk mengatur kolaborasi antar organisasi, baik di antara instansi pemerintah dan dengan area pribadi atau pertemuan luar lainnya, terutama untuk tujuan evaluasi ulang; b. *Koordinasi Rantai Nilai* mengidentifikasi dengan keinginan dan

kapasitas otoritas publik untuk menggabungkan siklus dan latihan yang berbeda di dalam administrasi dengan siklus dan latihan kaki tangan yang berbeda dengan tujuan definitif menawarkan jenis bantuan yang ideal dan mahir kepada klien; dan c. *Penilaian Persiapan Publik* mengidentifikasi dengan adanya instrumen di dalam otoritas publik untuk mengevaluasi sejauh mana daerah siap menghadapi pelaksanaan berbagai program e-Government yang telah dikirimkan.

Eksekusi Sudut Pandang Eksekutif Sudut terakhir yang harus dipertimbangkan adalah kapasitas otoritas publik untuk memutuskan dan mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan program e-government yang ada. Pada tingkat dasar, ada 5 (lima) sub-perspektif yang harus direnungkan secara menyeluruh, yang masing-masingnya adalah sebagai berikut: a. *Pemenuhan Pelanggan* diidentifikasi dengan instrumen otoritas publik untuk mengukur kelangsungan hidup organisasi yang didukung oleh *Wajib Pajak elektronik* yang dijalankannya menurut perspektif klien (klien akhir); b. *Security Compliance* diidentifikasi dengan jaminan hak-hak perlindungan (*secrecy*) individu atau kumpulan individu yang harus dipastikan sebagai komponen pertukaran dan koneksi yang terjadi dalam kerangka e-government; c. *Pengecekan Keuntungan* diidentifikasi dengan kapasitas otoritas publik untuk menyaring keuntungan yang dirasakan oleh pertemuan yang berbeda setelah kerangka e-government dijalankan d. *Konsistensi* mengidentifikasi dengan komponen untuk menyaring dan mengukur tingkat aksesibilitas inovasi data yang diperlukan (set data, aplikasi, dan inovasi) untuk menjalankan kerangka e-government sebagaimana diatur baru-baru ini (menjamin bahwa tidak akan ada gangguan besar di kemudian hari); selanjutnya, e. *Pengembangan e-Government Revealing* mengidentifikasi dengan memiliki kerangka kerja pengumuman yang layak dan menarik di dalam otoritas publik terkait dengan pentingnya memperkirakan pencapaian pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk dicapai oleh setiap aplikasi e-government. Untuk setiap sudut pandang ini, beberapa sub-perspektif harus dipertimbangkan untuk melihat apa yang bahkan dari persiapan yang dilakukan oleh pemerintah yang penting. Terdapat 5 (lima) level pada setiap sub-angle yang menggambarkan posisi ketersediaan otoritas publik. Kelima tingkatan tersebut adalah: 1. *Tidak Ada/Kurang*, jika sub-sudut pandang yang signifikan belum diklaim atau bahkan dipertimbangkan oleh otoritas publik; 2. *Tahap awal Kemajuan*, jika sub-perspektif yang bersangkutan sudah mulai dibicarakan di kalangan otoritas publik dan berusaha untuk dikembangkan lebih lanjut; 3. *Praktik Administrasi Hebat*, jika sub-sudut penting telah dibuat dan dibuat oleh pemerintah yang berlaku; 4. *Latihan Lanjutan*, jika sub-sudut terkait belum dilakukan, mereka juga telah dibuat menuju kerangka yang lebih halus dan kompleks; dan 5. *Praktik Terbaik Industri*, jika sub-sudut yang berlaku telah dieksekusi sedemikian rupa dan merupakan kasus terbaik pada titik mana pun yang diketahui oleh otoritas publik.

Kemajuan tersebut dilakukan seiring dengan e-government yang terjadi menjelang akhir tahun 2014 atau pada awal organisasi Presiden Joko Widodo dalam menyiapkan situasi remunerasi atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dimana dana pembayaran bahan bakar akan dikirim secara elektronik. tunai (e-cash) dengan cara e-cash. rekaman portable. Nantinya, setiap daerah yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat remunerasi nantinya akan memiliki rekening handphone. Lebih jelasnya, uang gaji akan dikirimkan dari rekening ponsel, kemudian, pada saat itu, keseimbangan dapat dilihat dan dapat diambil uangnya untuk ke tempat-tempat yang ditentukan, salah satunya adalah stasiun pos. Motivasi di balik strategi ini adalah otoritas publik akan lebih mahir karena tidak harus mengirim uang tunai yang menghabiskan sebagian

besar hari. Telepon dipilih sebagai cara karena diketahui bahwa hampir setiap daerah saat ini memiliki telepon seluler. Setiap keluarga tidak berdaya akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan 1 SIM Card untuk diinisiasi di ponselnya. Nomor telepon pada kartu SIM juga berfungsi sebagai nomor catatan untuk penggunaan dana Investasi Keluarga Sejahtera.

Setiap keluarga mendapat Rp. 200.000,- setiap bulan diarahkan melalui nomor record. Nantinya, warga bisa melihat penyebaran aset tersebut melalui aplikasi *141*6# dari ponsel masing-masing. Jika kita memeriksanya dengan mata telanjang, kemajuan ini merupakan penyesuaian budaya peraturan dimana dalam kebiasaan lama, individu akan mendapatkan imbalan melalui berbaris di tempat tertentu untuk mengumpulkan sejumlah uang tertentu. Padahal, dengan demikian keuntungan akan dirasakan baik oleh daerah setempat maupun oleh otoritas publik itu sendiri. Untuk daerah, tentunya akan menghemat waktu dan tenaga karena bayaran cadangan tidak harus dibayarkan setiap bulan dengan berjuang mengantri di counter tertentu

Bagi pejabat publik itu sendiri, ini seharusnya menjadi cara yang efektif untuk menghemat biaya dan waktu dalam menyebarkan uang untuk disampaikan kepada individu yang memenuhi syarat untuk itu. Meskipun demikian, hal utama yang harus diingat hanyalah kemauan politik otoritas publik. Dengan adanya strategi pertukaran baru, itu juga harus disertai dengan pengawasan dan penilaian yang dapat diterima dari teknik pertukaran baru. Harus ada kerangka pengamatan yang memadai untuk menjamin bahwa penyebaran melalui pertukaran ini berada di jalurnya. Ini menyiratkan bahwa uang tunai yang diarahkan melalui rekening ponsel ini harus diwakili. Teknik baru ini pasti akan menimbulkan bahaya baru, sehingga harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan bijaksana bagaimana mengantisipasi bahaya yang mungkin muncul dari pertukaran ini. Cobalah untuk tidak membiarkan teknik baru tersebut hanya meninggalkan isu-isu baru yang pada akhirnya produktivitas kerja yang direncanakan untuk digarap untuk kepentingan umum harus diapresiasi secara singkat dan bahkan tidak efektif. Ini harus benar-benar dipertimbangkan dari awal hingga akhir sehingga efeknya tidak dirasakan oleh semua pihak.

Tantangan Dalam Penerapan E-Government Di Indonesia

Setiap perubahan, terlepas dari apakah itu untuk pengembangan, secara positif akan menyebabkan tanggapan yang berbeda mulai dari hanya mempertanyakan kecukupannya hingga pemecatan tergantung pada taruhan pribadi rahasia yang bertentangan dengan motivasi di balik perubahan. Selain itu, progres yang dilakukan di area otoritas publik tentu jauh lebih rumit dan karenanya akan sangat menantang jika dibandingkan dengan progres yang disajikan di area privat. Hal ini tidak terlepas dari dampak contoh penyelenggaraan administrasi otoritas publik yang sudah sangat lama disahkan, dan dianggap sesuatu yang benar. Oleh karena itu, melakukan perubahan atau perubahan di bidang ini jelas membutuhkan usaha yang keras dan mantap. Pemanfaatan e-government sebagai salah satu teknik pengembangan di kalangan instansi pemerintah, sebagai sistem kemajuan yang diterapkan pada suatu asosiasi bisnis, tentunya membutuhkan pergantian pengurus yang tepat untuk kemakmurannya. Pelaksana e-government menyiratkan melakukan kemajuan perubahan atau perubahan sosial. Perubahan dewan dalam pengaturan ini berpusat pada bagaimana orang-orang yang berinvestasi di administrasi siang hari bolong memasuki periode kemajuan dari cara-cara biasa untuk berurusan dengan para eksekutif, dari saat pra-data dan inovasi korespondensi. menuju waktu lain di mana iklim terus berubah dengan cepat melalui peningkatan data yang sangat kompleks dan inovasi korespondensi (Riley, 2003). Dengan cara ini, perubahan eksekutif lebih ditekankan untuk merencanakan orang yang terkait dengan interaksi perubahan. Hal ini karena keberhasilan program pengisian ulang atau perubahan umumnya ditentukan oleh mentalitas dan dukungan dari setiap bagian dari asosiasi di semua tingkatan. Perubahan membutuhkan tanggung jawab dan konsistensi aktivitas yang tinggi terhadap kualitas-kualitas yang perlu ditegaskan untuk menggantikan kerangka nilai lama yang dianggap sudah tidak berlaku. Setiap perubahan,

apapun struktur dan alasannya, akan selalu menghadapi upaya oposisi dari beberapa kelompok yang kurang stabil terhadap perubahan atau juga pihak-pihak yang kurang berharap dalam hal tercapainya suatu perubahan. Selanjutnya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana membatasi hambatan dan menyusun kewajiban yang khas untuk menggelar perbaikan yang ideal sebuah kemenangan. Pelaksanaan e-government akan memberdayakan perubahan sosial, yang berarti juga penyesuaian kerangka nilai, dalam administrasi otoritas publik, namun juga di arena publik secara keseluruhan, termasuk wilayah swasta dan LSM. Dari budaya administratif yang tertutup menjadi budaya yang lugas, di mana minat akan keterusterangan semakin membumi dari tingkat terdekat, publik dan global (antar negara). Ini jelas membutuhkan persiapan mental dan kemampuan aset manusia yang memadai.

Di Indonesia, kendala mendasar dalam pelaksanaan e-government jelas adalah faktor internal pemerintah, terutama komponen manusianya atau lebih eksplisitnya, tidak adanya kebaikan dari pemerintah (Pejabat/Kepala Balai Kota) sebagai pimpinan di tingkat terdekat. Saat pembicaraan ini diangkat, ada banyak pandangan sinis yang muncul sebagai kesan keengganan yang singular untuk melakukan perubahan dengan penuh semangat. Ini jelas dipengaruhi oleh elemen yang berbeda, termasuk: keharusan aset, baik moneter, dan rendahnya otoritas inovasi data di antara perwakilan pemerintah terdekat. Disposisi negatif atau ketidakmampuan ini tentu saja sangat waras berpikir bahwa e-government membutuhkan otoritas inovasi korespondensi dan kemampuan moneter yang tinggi, juga dampak dari elemen eksplisit atau kondisi tertentu di setiap negara. Misalnya, membangun sirkuit web untuk e-government di Fiji menghabiskan biaya beberapa kali lipat dari yang dihabiskan di Jamaika (Campo, et.al., 2002). Selain itu, hambatan juga bisa datang dari luar otoritas publik (unsur luar), khususnya ketidakmampuan daerah itu sendiri mengingat sangat sedikit yang mengetahui tentang surat menyurat melalui inovasi komputerisasi. Hal ini ditunjukkan ketika pelaksanaan sistem perdagangan informasi elektronik (EDI) untuk mengawasi metode pengiriman impor di Kantor Tradisi, banyak klien atau organisasi tidak siap dengan kerangka tersebut. Huseini (1999) dalam tayangannya menggambarkan tiga macam kesulitan dalam pelaksanaan e-government, khususnya yang substansial, immaterial dan seluruhnya teoritis (dalam Muluk, 2001). Kesulitan, misalnya, membatasi kantor dan kerangka kerja komunikasi media dan organisasi kekuasaan, termasuk yang jelas. Sedangkan yang sulit dipahami, misalnya kesulitan keuangan, dan keterbatasan SDM. Sementara itu, yang disebut sepenuhnya immaterial adalah ketabahan mental aparat pemerintah lingkungan untuk menjalankan e-government di samping pelaksanaan berbagai kegiatan sebagai hasil yang harus dilakukan, misalnya, menerapkan disiplin untuk semua pelanggaran dan bagaimana membangun masyarakat informasi. dalam administrasi otoritas publik itu sendiri (Muluk, 2001). Berbagai hambatan dan kesulitan dalam e-government sebenarnya dapat diatasi selama kebaikan otoritas publik untuk melaksanakan kerangka tersebut tetap solid dan dapat diandalkan. Masyarakat, khususnya di negara-negara non-industri, akan dengan cepat maju menuju masyarakat terkomputerisasi yang digambarkan sebagai berikut (Campo, et.al., 2002):

1. meningkatnya jumlah individu yang menggunakan PC
2. berkurangnya biaya komunikasi.
3. kenyamanan dan akses ke berita hangat telah menjadi kebutuhan
4. persyaratan untuk "kepuasan individu massal"
5. "bekerja dari rumah"
6. aksi moneter di seluruh dunia Penyesuaian desain pergerakan di antara area lokal yang lebih luas benar-benar sebuah peluang untuk pemanfaatan bisnis online pemerintah.

Kekecewaan seperti yang terjadi pada EDI di Bea Cukai, pada dasarnya dapat dibatasi dengan memiliki kerangka kerja yang lebih luas dan terbuka untuk umum, tidak terbatas pada klien tertentu. Individu dengan pendidikan PC dan atribut kemahiran data yang umumnya tersebar di berbagai wilayah dan komunitas perkotaan adalah salah satu pendorong mendasar

e-government. Hal ini tidak bisa dibedakan dari pentingnya kepentingan publik dalam administrasi besar, hanya saja kerjasama yang dilakukan dengan inovasi data. Kerjasama daerah dan dunia usaha dalam e-government akan semakin ditentukan oleh kepentingan normal dengan adanya administrasi publik yang semakin ahli dan berkualitas, serta perhatian terhadap administrasi. Dalam situasi tertentu, penting untuk membuat hubungan antara pertemuan yang berbeda untuk mengakui e-government suatu kebutuhan dan merupakan cara terbaik, mengingat sebagian dari sisi positif dari e-government seperti yang digambarkan sebelumnya. Mengingat konsekuensi dari pemeriksaan keuntungan penghematan uang yang disusun oleh Idham Ibtly (2001), dari beberapa pendekatan elektif, e-government dipandang siap untuk memenuhi sifat administrasi sebagaimana ditentukan dalam aturan untuk tujuan strategi dengan tujuan. bahwa bantuan publik ini adalah instrumen yang sah untuk daerah setempat. Aturan sasaran pengaturan tersebut antara lain:

1. Perubahan administrasi publik dalam sistem ekonomi yang tidak diatur dan pertukaran ke dalam yang bebas
2. Desentralisasi dan Kemerdekaan
3. Perampingan dan kecukupan sumber daya manusia dan aset
4. Keseimbangan akun teritorial fokus dan kebebasan lokal
5. Proporsi keuntungan penghematan uang yang diperuntukkan bagi premi masyarakat
6. Terlebih lagi, kelangsungan hidup pemerintah Untuk mencapai tujuan pendekatan sesuai standar ini, tentu saja praktis untuk menjadi sederhana.

Hal penting yang harus diperhatikan adalah membangun harmonisasi antara andalan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya dalam membentuk pandangan (orientasi) terhadap gagasan tanggung jawab publik yang selama ini belum sepenuhnya benar. Untuk itu kami menginginkan suatu kemajuan pendekatan untuk mendorong tercapainya perkembangan tersebut. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain mencakup (Campo, et.al, 2002):

1. Kebijakan yang dapat membangun lingkungan politik yang mendorong pengambilan bahaya di antara administrasi negara. Kualitas standar perilaku pribadi yang mengatur yang akan lebih sering menjadi norma sangat menentang bahaya, cenderung tidak menyukai kemajuan yang pencapaiannya tidak jelas dan condong ke contoh lama yang dianggap benar, ini adalah kesempatan yang baik untuk menggantikan mereka dengan nilai-nilai yang menghargai pengembangan dan inovasi.
2. Kebijakan yang memberi energi pada penggerak di sekitar. Kurangi pemerintah pusat atau publik, untuk kemudian melibatkan yayasan terdekat karena mereka lebih dekat dengan jaringan, pertemuan lokal, dan organisasi. Melalui pembenahan struktur pemerintahan terdekat, dapat berubah menjadi "pintu terbuka" bagi peluang pemikiran dan perubahan, termasuk dalam pelaksanaan TIK.
3. Pengaturan yang menempatkan tujuan bisnis dalam bantuan terbuka. Ini tidak berarti membuat penampilan bisnis dalam menawarkan jenis bantuan publik, melainkan untuk memberdayakan peningkatan kualitas administrasi yang langsung dinikmati oleh daerah sebagai klien melalui kerangka evaluasi yang kejam. Melalui pengaturan yang digambarkan di atas, diyakini bahwa mereka akan benar-benar ingin mengubah kerangka nilai lama dan standar perilaku pribadi menjadi standar perilaku pribadi baru yang merupakan jaringan antara berbagai bagian dan lapisan masyarakat, area pribadi/pemimpin bisnis, dan pemerintah yang menjamin akomodasi, kecepatan dan akhirnya pemenuhan. Dasar dari jaringan tersebut adalah usaha sosial yang luar biasa yang dalam jangka panjang akan membawa perkembangan ke daerah setempat. Sudah menjadi ciri khas bahwa sampai saat ini, administrasi yang dikelola negara di negara-negara berkembang memiliki biaya yang signifikan, namun menawarkan tidak banyak jenis bantuan, dan kurang responsif atau kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, perubahan diharapkan dapat mengalahkan patologi yang sedang berlangsung

ini. Meskipun demikian, sejauh ini hasil yang diperoleh dari siklus kemajuan yang telah dilalui belum memberikan hasil yang maksimal, namun masih sangat jauh dari asumsi. Dalam rangka melaksanakan pembenahan provinsi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penting untuk membentuk organisasi yang partisipatif, lugas, dan responsif di antara pilar-pilar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selanjutnya hubungan tersebut harus digarap dengan menerapkan inovasi data atau administrasi berbasis e-administrasi (Effendi, Sofyan, 2001 dalam Azari, Idham, (ed) 2002).

Berangkat dari kekecewaan, seperti halnya mengubah perilaku kemajuan atau sikap pekerja, penting untuk memiliki pemahaman tentang gagasan pergantian wilayah dan bagaimana melakukannya melalui otoritas publik. Sebagaimana ditegaskan oleh Effendi (2001) pembenahan provinsi pada masa kemerdekaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang besar pada hakikatnya harus memiliki tujuan-tujuan berikut:

1. Memperluas kemampuan keuangan daerah untuk membuat dan lebih mengembangkan lingkungan sehari-hari secara wajar dan berkeadilan.
2. Peningkatan masalah kesehatan, pengajaran, penginapan, dan posisi terbuka untuk jaringan lingkungan
3. Pemberdayaan pelaksanaan kebebasan bersama, peluang politik dan pemerintahan kerakyatan.
4. Menciptakan kemajuan
5. Memperluas perhatian pada kebutuhan untuk kemajuan yang dapat didukung Seperti yang ditunjukkan oleh hasil studi dan eksplorasi dari Harvard JFK School of Government (Indarjit, 2004: 15),

Untuk menerapkan ide-ide digitalisasi di area publik, ada merupakan tiga komponen prestasi yang harus dimiliki dan dipikirkan secara sungguh-sungguh. Masing-masing komponen kemajuan tersebut adalah:

1. Dukungan Komponen pertama dan paling signifikan yang harus dimiliki oleh otoritas publik adalah keinginan otoritas publik dan politik yang berbeda untuk benar-benar menjalankan ide e-government, bukan sekadar mengejar arahan atau drive terkait dengan standar e-Government. Tanpa "kemauan politik" ini, berbagai dorongan kemajuan dan perbaikan e-government tidak dapat berjalan dengan baik. Yang dimaksud dengan pertolongan disini juga diharapkan hanya berupa kata-kata, namun terlebih lagi pertolongan yang biasa adalah sebagai hal-hal yang menyertai: a. Penyelesaian sistem e-government sebagai salah satu kunci keberhasilan negara dalam mewujudkan visi dan misi negara, sehingga perlu mendapat perhatian yang tinggi. b. Penyebaran gagasan e-government secara merata, terus-menerus, andal, dan sepenuhnya kepada semua administrator khususnya dan masyarakat umum secara keseluruhan melalui misi pemikiran yang berbeda.
2. Batasan Adanya kapasitas atau penguatan pemerintah lingkungan untuk mewujudkan "impian" e-government yang terhubung menjadi kenyataan. Ada tiga hal yang harus diklaim oleh otoritas publik terkait dengan komponen ini, secara spesifik: a. aksesibilitas aset yang memadai untuk menjalankan drive e-government, terutama yang diidentifikasi dengan aset moneter. b. Aksesibilitas landasan inovasi yang memuaskan, ini adalah setengah dari keberhasilan pelaksanaan e-government. c. aksesibilitas SDM yang memiliki keterampilan dan penguasaan yang dibutuhkan agar pelaksanaan e-government dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Nilai Komponen pertama dan kedua merupakan dua perspektif yang dilihat dari sisi otoritas publik sebagai organisasi spesialis (supply side). Berbagai upaya e-government akan sia-sia jika tidak ada perkumpulan yang merasa diuntungkan dari pelaksanaan ide tersebut. Untuk situasi ini, apa yang menentukan besar kecilnya keuntungan yang didapat dengan adanya e-government ditentukan oleh otoritas publik itu sendiri, namun daerah setempat dan individu yang tertarik

(sisi permintaan). Oleh karena itu, otoritas publik harus benar-benar berhati-hati dalam memilih aplikasi e-government seperti apa yang harus dibuat untuk benar-benar menawarkan manfaat (manfaat) besar yang dirasakan oleh daerah setempat. Bagaimanapun, bagi sebagian besar daerah, hambatan yang membuat kekecewaan pelaksanaan e-government di Indonesia bisa muncul dari faktor otoritas. Elemen ini dipengaruhi oleh perselisihan antara pengaturan pemerintah pusat dan administrasi negara tetangga. Elemen yang berbeda adalah pedoman yang tidak mendukung, kurangnya pengawasan rencana keuangan, kerangka normalisasi yang tidak jelas, yang semuanya ditentukan oleh tanggung jawab perintis atau otoritas untuk pelaksanaan e-government. Untuk sementara, apa yang sangat penting namun membutuhkan kewajiban yang kuat untuk berubah adalah variabel sosial. Instruksi pemerintah di Indonesia sangat sederhana untuk mendapatkan pengakuan terhadap inovasi dan relatif sedikit pionir yang memiliki impian untuk menciptakan administrasi elektronik. Namun, persoalannya, pemanfaatan e-government seringkali membentur faktor sosial daerah yang tidak kuat. Elemen sosial di antara administrator dalam organisasi pemerintah secara teratur melewati titik di mana dimungkinkan untuk mengakui dan menyukai pentingnya e-government. Apa yang sering muncul adalah bahwa itu adalah atau bukan distorsi bahwa aplikasi e-government membahayakan posisi pendiriannya. Kami juga sering melihat bahwa percampuran antara yayasan negara, organisasi dan non-kementerian masih terus terhambat karena masing-masing dari mereka lebih suka tidak berbagi informasi dan data. Dari berbagai contoh aplikasi e-government di posisi pemerintah, tampaknya kekecewaan proyek e-government umumnya disebabkan oleh kekecewaan kerangka kerja. Alasan kekecewaan bisa karena inovasi atau fondasi, faktor otoritas, atau elemen sosial. Robert Heeks (2003) menyatakan bahwa sebagian besar kekecewaan aplikasi e-government di negara-negara berkembang adalah karena tidak adanya pemahaman "di mana kita sekarang" dengan "apa yang akan kita capai dengan proyek e-government" (di mana proyek e-government perlu berada). untuk mendapatkan kita). Secara keseluruhan, apa yang biasa terjadi adalah bahwa ada jurang yang lebar antara faktor-faktor nyata saat ini dan rencana e-government yang berkembang. Lubang ini ada dalam berbagai aspek yang Heeks menggabungkan Data, Inovasi, Siklus, Sasaran dan Aset, Kepegawaian dan Kemampuan, Kerangka dan sumber daya. Menurut Heeks dapat digambarkan sebagai berikut:

Lima alasan kekecewaan E-government seperti yang ditunjukkan oleh Heeks (2003) Terlepas dari seberapa modern inovasi yang digunakan, jika tidak didukung oleh perubahan dalam kerangka administrasi dan desain hierarkis, proses yang lebih sesuai dengan pemanfaatan inovasi data, maka pada saat itu e-government akan lalai untuk mencapai tujuannya. Untuk situasi ini, pentingnya komponen sosial dalam administrasi otoritas publik juga terlihat. Tanpa dibarengi dengan perubahan budaya regulasi yang umumnya akan menopang KKN, tugas inovasi data mungkin hanya akan membuat pendekatan yang lebih baik untuk kemerosotan dan intrik yang semakin cepat dan rapi sehingga akan sulit bagi individu konvensional untuk membedakannya. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan e-government di Indonesia antara lain:

1. Cara hidup berbagi belum ada. Tidak ada budaya berbagi data dan membuat segalanya lebih mudah. Memang banyak individu yang melakukan tindakan untuk mempersulit dalam mendapatkan data tersebut.
2. Cara hidup pelaporan belum normal. Mungkin masalah terbesar yang kita hadapi adalah tidak adanya kecenderungan untuk mengarsipkan apa pun. Namun kemampuan untuk merekam adalah bagian penting dari pedoman pemrograman komputer.
3. Masih kurangnya SDM yang dapat diandalkan. Inovasi data adalah bidang lain. SDM bidang inovasi data sebagian besar dimiliki oleh iklim bisnis/industri. Ini akan jauh lebih mengerikan jika tidak adanya batasan otoritas publik dimanfaatkan oleh organisasi dengan menjual pengaturan yang salah dan boros.
4. Pondasi yang kurang dan mahal. Landasan komunikasi media di Indonesia masih belum

merata. Terlepas dari apakah ada kantor, biayanya masih cukup mahal.

5. Tempat masuk terbatas. Sesuai dengan poin di atas, jumlah tempat untuk mendapatkan data juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, otoritas publik dan daerah bekerja sama untuk membuat jalan yang masuk akal. Ini juga harus dijalankan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemajuan dalam komunikasi dan teknologi data melalui web telah membuka kebebasan untuk memperluas hubungan antara masalah pemerintahan, sistem aturan mayoritas dan masyarakat. E-government merupakan salah satu metode untuk membuat interaksi politik lebih partisipatif dan berbasis popularitas. Masyarakat umum dapat secara langsung terlibat dengan cara yang paling umum untuk mengatur, melaksanakan dan mengelola pengaturan publik. Kemajuan inovasi web tidak hanya memperluas kemampuan, kelangsungan hidup, dan kecepatan peningkatan administrasi publik, tetapi juga mendukung diskusi publik yang mengarah pada penilaian dan pembahasan pilihan politik dan kegiatan manajemen kebijakan. Eksplorasi dan dokumentasi praktik terbaik di berbagai negara mengusulkan tiga tahap penting dalam menciptakan e-government:

1. Peningkatan jaringan dan kerangka kerja
2. Pengembangan konten dan aplikasi
3. Kerangka atau kombinasi Apa yang ditawarkan e-government adalah manfaat utama Inovasi

Korespondensi Data (TIK) yang mendorong tiga perubahan yang membuat administrasi dapat diterima di negara-negara berkembang, yang meliputi:

1. Mekanisasi, khususnya peralihan dari data manual ke inovasi terkomputerisasi
2. Data, khususnya mempercepat siklus data, misalnya dalam hal menuju arah dan pelaksanaan pilihan
3. Perubahan, lebih tepatnya pembuatan teknik pertolongan publik yang lebih cepat dan cakap.

Ketiga perubahan besar tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi badan publik dalam menyelesaikan pergantian peristiwa, khususnya pergantian wilayah dan administrasi publik, khususnya:

1. Efektivitas, dimana otoritas publik dapat menawarkan jenis bantuan dengan biaya yang lebih murah, dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, dan dapat bekerja lebih cepat. Badan publik dapat memberikan hasil yang sama dengan biaya yang lebih rendah, badan publik dapat menciptakan hasil yang lebih besar dengan biaya yang sama, dan badan publik dapat memberikan hasil yang sama dengan biaya yang sama, namun dalam waktu yang lebih terbatas.
2. Efektivitas, yang mengandung arti bahwa otoritas publik dapat bekerja lebih baik dan lebih inventif. Badan publik dapat menciptakan jumlah hasil yang sama, dengan biaya dan waktu yang relatif sama, namun dengan norma kualitas bantuan yang lebih baik, dan dapat menangkap keinginan individu yang dilayaninya dengan memberikan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas daerah setempat. Pemerintah Indonesia perlu segera mempertimbangkan untuk melaksanakan e-government sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan, bantuan pemerintah dan pemerataan kerabatnya. Pelaksanaan e-government merupakan salah satu bentuk pemerintahan Indonesia menuju pemerintahan yang terbuka dan kekinian. Pemerintah Indonesia dengan kerangka "open government" akan menjadikan Indonesia negara yang kokoh dan bersih dengan tanggung jawab yang dapat diandalkan menurut masyarakat Indonesia dan dunia. Masyarakat umum kita saat ini sedang melalui tahap transformatif sejauh

memilah dan menyampaikan. Sudah menjadi kewajiban dan komitmen otoritas publik untuk secara konsisten tanggap dan menyesuaikan diri dengan contoh dan pola baru yang secara konsisten akan terjadi di arena publik. Sehingga setiap perkembangan yang terjadi harus diharapkan dan dirasakan dan digarap lebih lanjut dengan jenis inovasi jaringan yang mendukung secara emosional, khususnya e-government. Bagaimanapun, pada akhirnya yang utama adalah fokus pada metode pengawasan. Jadi terlepas dari seberapa canggih teknologi itu, tujuan mendasarnya adalah cara untuk memenuhi komitmen pelayanan publik dengan tepat dan bagaimana otoritas publik bertanggung jawab dengan transparansi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran yang diajukan yaitu:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Kerangka Kerja. Bisa mendorong investasi dalam peningkatan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi, dan memastikan adopsi kerangka kerja yang kuat untuk mendukung efisiensi dan keamanan sistem e-government.
2. Pengembangan Konten dan Aplikasi. Fokus pada pengembangan konten dan aplikasi yang ramah pengguna dan relevan bagi masyarakat, dan bisa melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan solusi.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan penerapan e-government di Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andrianto, Nico. 2007. Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government. Malang: Banyumedia Publishing.
- Campo, Salvatore Schiavo and Sundaram, Paschampet. 2002. To Serve and To Preserve: Improving Public Administration in A Competitive World. Asean Development Bank. E-governancein Depth.
- E Prasojo dan T Kurniawan. 2004. hambatan dalam Penerapan E-government di Indonesia. Laporan Penelitian. dia Fisip UI.
- Heeks, Richard. 2003. Most e-government for Development Project Fail: How Can Risk be Reduced?. iGovernment Working Paper Series. Manchester: Institute for Development Policy and Management.
- Indrajit, Richardus E. 2002. Electronic Government. Yogyakarta:
- Andi Offset .2004. E-government strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta:
- Andi Offset. Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Kegagalan Penerapan E-government dan kegiatan tidak Produktif dengan Internet. Yogyakarta. Gama Press. Purwandani,
- Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Publik kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media class.
- Winarno, Budi. 2002. Teori serta Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Pressindo.

Jurnal :

- Rokhman, Ali. 2008. Potret dan hambatan e-government Indonesia. inovasi Online. Edisi Vol 11/XX. Juli 2008.

Peraturan/Undang-Undang :

Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang isu dan Transaksi elektronik.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika).

Instruksi Presiden No . 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan e-Government.

